

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1998 Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik
- Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum
- Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Teknis Perizinan, Pengawasan Dan Tindakan Kepolisian Pada Kegiatan Keramaian Umum Dan Kegiatan Masyarakat Lainnya
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/95

Buku

- Susiani Dina. Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahta Media Group, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.

Skripsi.Tesis/Disertasi

- Adrian Zoni, *Prosedur Izin Keramaian Umum Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002*

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2020.

Aulia Mardhiyah, *Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* Executif Summary, Skripsi, Universitas Bung Hatta Padang, 2023.

Yohana Jane, *Pengawasan Kepolisian Resor Tana Toraja Terhadap Izin Keramaian Pada Pelaksanaan Acara Rambu Solo' Di Era New Normal*, Skripsi, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Susanti, *Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Dan Ketertiban Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Kapolsek Sektor Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Jurnal Hukum

Annisa Mutiara, *Kajian Tentang Peraturan Pelaksana Izin Keramaian Di Indonesia*, 2019.

Jovani Audra, *Modul Hak Asasi Manusia Mata Kuliah HAM Dan Demokrasi*.

Laksit Joni, Dyah Listyarini, *Hukum Perizinan Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas STIKOM*, 2024.

Maulana Rifky, *Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*.

Muhammad Farouk, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2003.

Putri Edwia, *Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara*.

Prakoso Djoko, *Polri, sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. BINA AKSARA, Jakarta, 1987.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009.

Satria Buana Mirza, dkk, *Persoalan dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul Di Indonesia*, vol28.iss3.art6, 2021.

Rahayu Wilujeng Sri H, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*.

Ulfah Maria, Koerniatmanto Soetoprawiro, *Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*, 2013.

Media Elektronik

<https://polri.go.id/visimisi> diakses pada Tanggal 12 Juli 2025.

<https://prokopim.sumbawabarakab.go.id/gambaran-umum/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2025.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) Sumbawa Barat diakses pada tanggal 9 Mei 2025.

